

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

Realisasi Pendapatan Negara sampai pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.429.567 dibandingkan dengan pada 31 Desember 2024 Rp 29,381,552. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 12,659,396,766 atau mencapai 90.83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 13,937,135,000

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 13,026,660,560 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 928,089,098 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 12,098,571,462 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 2,231,827 dan Rp 13,024,428,733

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 15,012,620,914, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (15,012,620,914) Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 2,429,567 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (15,010,191,347)

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 15.377.868.706 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(15,010,191,347) kemudian di tambah dengan koreksi atas reklasifikasi Rp 5,635,472 dan di kurangi dengan koreksi nilai aset non revaluasi Rp (5,635,472) ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 12,656,751,374 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 13,024,428,733

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode sampai dengan 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## **I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE DESEMBER 2025 DAN 31 Desember 2024**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.429.567	100,00	17.372.200
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>2.429.567</b>	<b>100,00</b>	<b>17.372.200</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	3.936.894.000	3.930.238.134	99,83	4.034.240.411
Belanja Barang	B.4	9.977.041.000	8.705.958.632	87,26	11.938.997.425
Belanja Modal	B.5	23.200.000	23.200.000	100,00	882.601.310
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>13.937.135.000</b>	<b>12.659.396.766</b>	<b>90,83</b>	<b>16.855.839.146</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## II. NERACA

### STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>T</b>			
<b>T LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	928.089.098	734.968.204
Jumlah Aset Lancar		928.089.098	734.968.204
<b>TANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>T TETAP</b>			
Tanah	C.14	2.228.156.034	2.228.156.034
Peralatan dan Mesin	C.15	39.879.223.437	39.866.263.237
Gedung dan Bangunan	C.16	10.071.443.993	10.071.443.993
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	995.251.376	995.251.376
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(41.075.503.378)	(38.514.679.056)
Jumlah Aset Tetap		12.098.571.462	14.646.435.584
<b>T LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	385.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	(385.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>ILAH ASET</b>		<b>13.026.660.560</b>	<b>15.381.403.788</b>
<b>/AJIBAN</b>			
<b>/AJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	60.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	2.231.827	3.535.082
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	7.377.800	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.231.827	3.535.082
<b>ILAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.231.827</b>	<b>3.535.082</b>
<b>ITAS</b>			
Ekuitas	C.28	13.024.428.733	15.377.868.706
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>13.024.428.733</b>	<b>15.377.868.706</b>
<b>ILAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>13.026.660.560</b>	<b>15.381.403.788</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31  
Desember 2024**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.930.238.134	4.034.240.411
Beban Persediaan	D.3	58.977.100	170.326.630
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.421.682.414	7.114.637.316
Beban Pemeliharaan	D.5	1.661.466.682	2.390.202.945
Beban Perjalanan Dinas	D.6	369.408.287	2.081.347.497
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.570.848.297	4.713.321.250
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>15.012.620.914</b>	<b>20.504.076.049</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(15.012.620.914)</b>	<b>(20.492.066.697)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		2.429.567	10.393.008
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.429.567	15.570.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		5.356.992	5.356.992
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>2.429.567</b>	<b>10.393.008</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(15.010.191.347)</b>	<b>(20.481.673.689)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(15.010.191.347)</b>	<b>(20.481.673.689)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	15.377.868.706	19.039.118.302
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(15.010.191.347)	(20.481.673.689)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	(4.609.001)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	5.635.472	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(5.635.472)	(4.617.112)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	8.111
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.565.751.374	16.825.033.094
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.353.439.973)	(3.661.249.596)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>13.024.428.733</b>	<b>15.377.868.706</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	<p>Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: per.33/PERMEN-Kp/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber dayakelautan dan perikanan;</li><li>2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;</li><li>3. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;</li><li>5. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;</li><li>6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;</li><li>7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;</li></ol>
--	--

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berkomitmen dengan visi “**pelaksanaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di lingkup Stasiun PSDKP Tahuna**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah kerja.
- Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di wilayah Stasiun PSDKP Tahuna.

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Lembaga, Memberantas IUU Fishing untuk meningkatkan kedaulatan Ekonomi, Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha masyarakat kelautan dan perikanan.

Stasiun PSDKP Tahuna memiliki Sumber daya Manusia bidang kelautan dan perikanan yang berstatus PNS sebanyak 28 orang, PPPK sebanyak 11 orang dan PJLP sebanyak 10 Orang

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Tahuna. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	10%

	Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
  - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
    - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
    - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
  - Rapat pembahasan permasalahan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan pencatatan dan pelaporan BMN Tahun 2017 dan 2018
1. Kebijakan akuntansi dan pencatatan persediaan
    - a. Persediaan Biota Ikan

- KSAP belum mengatur standar akuntansi terkait aset biologis sebagai persediaan;
- Perlu ada standar akuntansi untuk mencatat aset biologis, dhi. di lingkungan KKP berupa Persediaan biota ikan;
- KKP telah menerbitkan:
  - 1) Perdirjen Perikanan Budidaya Perdirjen PB No.300/PER-DJPB/2019 tanggal 28 September 2019 tentang pedoman umum penatausahaan barang persediaan kegiatan perekayasa dan produksi di unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
  - 2) SE Sekjen No.B.1550/SJ/PL.930/XII/2019 pada tanggal 28 Desember 2019 tentang penatausahaan barang milik negara berupa persediaan;
- KKP perlu melakukan evaluasi kembali atas SE Sekjen dan Perdirjen Perikanan Budidaya terkait pencatatan persediaan khususnya persediaan biota ikan yang disesuaikan dengan karakteristik nilai dan kuantitas persediaan (PNBP atau metode lainnya).

b. Persediaan Suku Cadang Kapal

- Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap dicatat sebagai persediaan;
- KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada di kapal.

c. Persediaan BBM Kapal

- Pencatatan persediaan BBM Kapal dikeluarkan dari Neraca namun perlu diungkap dalam CaLK KKP;
- BBM yang berada di kapal diperlakukan sebagai beban persediaan pada saat BBM diisi ke tangki kapal;
- Mengutip pernyataan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tingkat akurasi hasil stok opname fisik BBM di kapal tergantung pada posisi dan kondisi kapal;
- Cost untuk menghitung persediaan BBM Kapal lebih besar dibandingkan benefit dari pencatatan BBM Kapal, karena secara substansi KKP tidak memiliki gudang penyimpanan BBM kapal;
- KKP perlu membuat aturan terkait mekanisme pengendalian penggunaan BBM oleh Kapal, untuk mencegah penyalahgunaan BBM Kapal sebagai laporan manajerial;
- Di Tahun 2020 diperlukan review ulang atas penganggaran belanja BBM yang selama ini sebagai belanja persediaan

2. Pencatatan Aset Tetap & Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a. Aset Tetap

- Aset Tetap Tanah yang bersaldo tidak normal, merupakan aset urugan untuk pematangan

tanah senilai Rp1,88 miliar sebanyak 3 NUP di atas tanah milik Pemprov Sumatera Utara, Jambi, dan Sulawesi Tengah

- Aset tanah di atas tanah pemda, dilakukan koreksi menjadi ATR pada Satker Konsolidasi di tahun 2019 dan akan dilakukan koreksi di tingkat satker di tahun 2020. Selanjutnya KKP akan melakukan proses hibah ATR tersebut ke pemda terkait.
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp156 jt secara substansi merupakan persediaan habis pakai dan nilai buku sudah nihil. KKP di tahun 2020 akan melakukan penghapusan aset tersebut.
- Transaksi penyusutan tidak wajar senilai Rp50,98 miliar:
  - KKP akan mengungkapkan adanya penyusutan tidak wajar pada laporan keuangan Tahun 2019.
  - KKP akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk menyelesaikan penyusutan tidak wajar pada Aplikasi SIMAK di Tahun 2020

b. KDP

- Saldo KDP perolehan 2008-2017 sebanyak 281 NUP bernilai negatif senilai Rp78,87 Miliar
  - Aset KDP bernilai negatif tidak mempengaruhi nilai saldo KDP di Neraca

KKP per 31 Desember 2018, karena KDP yang dimaksud bernilai negatif per NUP juga memiliki nilai positif di NUP yang berbeda atas KDP yang sama.

- KDP bernilai negatif terjadi karena satker saat melakukan penginputan KDP menjadi aset defenitif menggunakan NUP yang berbeda dengan NUP KDP awal.
- NUP Aset KDP yg telah ditemukan aset defenitifnya sebanyak 105 NUP senilai Rp40,10 miliar.
- KDP memiliki transaksi mutasi yang tidak wajar senilai Rp0,79 Milyar antara lain penambahan/pengembangan/transfer masuk dinilai minus, transfer keluar dinilai positif yang merupakan bagian dari KDP sebanyak 281 NUP bernilai negatif sebesar Rp78,87 Miliar
- Mutasi keluar dari KDP senilai Rp3,18 Milyar tidak menambah aset tetap
  - Sebesar Rp1,9 Miliar sedang dilakukan inventarisasi.
  - Sebesar Rp1,2 Miliar telah ditemukan asetnya dan akan dicatat sebagai penambahan saldo awal pada Tahun 2020

### 3. ATB

- Saldo Hasil Kajian/Penelitian (Rekomendasi Teknologi) senilai Rp11,09 miliar akan dilakukan koreksi pada laporan keuangan Tahun 2019 karena secara substansi bukan merupakan ATB.

- Saldo Paten senilai Rp12,70 Miliar belum memasukkan:
  - 4 Paten belum jelas status sertifikatnya
  - 6 Paten sudah memiliki sertifikat
 KKP akan melakukan inventarisasi biaya perolehan.
  
- Amortisasi :
  - Amortisasi 26 paten senilai Rp1,04 Miliar belum didukung bukti pendaftaran.
  - Tanggal penerimaan 10 paten senilai Rp0,41 Miliar berbeda dengan tanggal perolehan untuk perhitungan amortisasinya.
 KKP akan melakukan inventarisasi bukti pendaftaran dan tanggal perolehan ATB.
  
- ATB pada Direktorat Pakan dan Obat Ikan tidak ditemukan senilai Rp221,48 juta
  - KKP telah mengidentifikasi jenis ATB tersebut. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dokumen perolehan ATB. Apabila ATB tersebut sudah tidak digunakan akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat jenderal Kekayaan Negara, Kementerian

Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik	4 tahun

Modern)	
---------	--

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- ✚ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✚ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- ✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) Nomor: SP DIPA-032.05.2.170445/2025 tanggal 2 Desember 2024, dengan nilai pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp.13.937.135.000,- (*Tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Nilai anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan serta Program Dukungan Manajemen. Penjabaran 2 (dua) program tersebut dicakup dalam 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Dukungan Manajemen Internal. Sampai pada Triwulan IV tahun 2025, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) telah melakukan revisi anggaran sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

*Realisasi*

**B.1 Pendapatan**

*Pendapatan Rp  
2,429,567*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2,429,567. berasal dari hasil penjualan lelang peralatan dan mesin tanggal 9 Januari 2025 NTPN; 9B6BD0NA0DE65VCD, NTB; 972052809479 Rp.2,429,567 sesuai risalah lelang nomor 4/16.01/2025-01 tanggal 9 Januari 2025

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024
Pendapatan Pelepasan Aset	2.429.567	15.750.000
Penerimaan Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.429.567</b>	<b>15.750.000</b>

*Realisasi Belanja  
Negara Rp  
13,937,135,000*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja Stasiun PSDKP Tahuna per31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 12,659,396,766 atau 90.83% dari anggaran belanja sebesar Rp 13,937,135,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025*

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.936.894.000	3.930.238.134	99,83%
Belanja Barang	9.977.041.000	8.705.958.632	87,26%
Belanja Modal	23.200.000	23.200.000	100,00%
<b>Total Belanja Koto</b>	<b>13.937.135.000</b>	<b>12.659.396.766</b>	<b>90,83%</b>
Pengembalian	-	-	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>13.937.135.000</b>	<b>12.659.396.766</b>	<b>90,83%</b>

*Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.930.238.134	4.034.240.411	-2,58%
Belanja Barang	8.705.958.632	11.938.997.425	-27,08%
Belanja Modal	23.200.000	882.601.310	-97,37%
<b>Jumlah</b>	<b>12.659.396.766</b>	<b>16.855.839.146</b>	<b>-25%</b>

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 25% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena adanya blokir pada anggaran serta belanja anggaran tahun 2025 yang lebih rendah bila dibandingkan tahun 2024.

*Belanja Pegawai* **B.3 Belanja Pegawai**

*Rp*

*3,930,238,134*

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun PSDKP Tahunana sampai pada periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,930,238,134 dan Rp. 4,034,240,411. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS dan PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 98,78% dari 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai pada lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dan Sampai pada periode Periode 31 Desember 2025 tidak ada Pengembalian belanja.

*Rincian Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.684.378.036	1.761.507.605	95,62%
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	301.778.915	193.228.678	156,18%
Beban Lembur PNS	-	48.910.000	0,00%
Beban Lembur PPPK	-	5.835.000	0,00%
Beban Tunjangan Khusus Kinerja	1.656.857.976	1.787.260.457	92,70%
Beban Tunjangan Khusus Kinerja PPPK	287.223.207	183.383.671	156,62%
<b>Sub Total</b>	-	-	0,00%
Pengembalian Belanja	-	-	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>3.930.238.134</b>	<b>3.980.125.411</b>	<b>98,75%</b>

*Belanja Barang  
Rp 8,705,958,632*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.8,705,958,632 dan Rp. 11,938,997,425 Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan 72.91% karena terjadi perubahan pagu anggaran Belanja Barang dalam DIPA Stasiun PSDKP Tahuna.

*Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	868.705.705	1.296.551.204	67,00%
Belanja Barang Non Operasional	4.635.011.783	5.297.021.735	87,50%
Belanja Barang Persediaan	58.692.100	181.269.980	32,38%
Belanja Jasa	919.268.181	533.029.852	172,46%
Belanja Pemeliharaan	1.854.872.576	2.563.502.157	72,36%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	369.408.287	2.070.120.980	17,84%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			0,00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8.705.958.632</b>	<b>11.941.495.908</b>	72,91%
Pengembalian Belanja		-	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.705.958.632</b>	<b>11.941.495.908</b>	72,91%

- Belanja barang Operasional sebesar Rp. 868,705,705,- meliputi kegiatan pembayaran Belanja penambah Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, belanja pengiriman surat dinas Pos pusat, belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja.
- Belanja barang non operasional sebesar Rp. 4,635,011,783- meliputi kegiatan pembayaran Belanja barang non operasional lainnya, belanja bahan, Belanja honor Output Kegiatan.
- Belanja barang persediaan sebesar Rp. 58,692,100 meliputi kegiatan pembayaran; Belanja barang persediaan barang konsumsi.
- Belanja barang jasa sebesar Rp. 919,268,181,- meliputi kegiatan pembayaran belanja jasa lainnya, jasa profesi, belanja langganan daya dan jasa lainnya, belanja langganan listrik, telepon, dan air dan belanja sewa.
- Belanja barang pemeliharaan sebesar Rp. 1,854,872,576 ,- meliputi kegiatan pembayaran

belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin.

- Belanja barang perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 369,408,287,- meliputi kegiatan pembayaran belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan tetap, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

*Belanja Modal*  
*Rp 23,200,000*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 23,200,000 dan Rp. 239,883,510 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9.67% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, hal itu disebabkan adanya blokir anggaran belanja modal tahun 2025.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.200.000	239.883.510	9,67%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		0	0,00%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>23.200.000</b>	<b>239.883.510</b>	<b>0,96%</b>
Pengembalian	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>23.200.000</b>	<b>239.883.510</b>	<b>9,67%</b>

*Belanja Modal Tanah Rp 0*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0, dan Rp.0. Tidak adanya belanja modal tanah karena sudah dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 23,200,000*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 sebesar Rp 23.200.000 untuk pembelanjaan Pengadaan AC Perbandingan nilai Belanja Modal tahun 2025 dan 2024 pada tabel diatas mengalami penurunan yang signifikan, di tahun 2025 belanja modal hanya Pembelian Peralatan dan Mesin berupa A.C Split sejumlah 4 (empat) unit senilai Rp. 23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing unit senilai Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). NUP 23 s/d 26 Merk/Type Panasonic Nomor kwitansi 00043/KW/170445/2025. Penurunan nilai belanja modal peralatan dan mesin di TA 2025 tidak terlalu besar dibandingkan belanja 2024 karena Nilai dan Jumlah kegiatan yang berbeda.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	23.200.000	239.883.510	9,67%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>23.200.000</b>	<b>239.883.510</b>	9,67%
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>23.200.000</b>	<b>239.883.510</b>	9,67%

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp  
0*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan *Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024* adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0. tidak ada penambahan Belanja modal Gedung dan bangunan

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan	0	0	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp 0*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan *Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024* adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Tidak ada belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan di tahun anggaran 2025

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 31  
Desember 2025 dan 31 Desember 2025*

<b>URAIAN JENIS BELANJA</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>30 Desember 2025</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Irigasi	0	0	-
Belanja Modal Jaringan	0	0	-
Belanja Penambah Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Penambah Nilai Irigasi	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya pada TA 2025 dan TA 2024.

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Pada TA 2025 dan 2024 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.0*

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0* **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar masing-masing Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp.0* **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Kas ini merupakan LS Perjalanan Dinas yang belum ditarik dan dibayarkan

*Piutang PNBPNP Rp0* **C.4 Piutang PNBPNP**

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0. Piutang PNBPNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa

*Piutang Bukan  
Pajak Rp0*

terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

### **C.5 Piutang Bukan Pajak**

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar  
TPA  
Rp0*

### **C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Lancar  
Rp0*

### **C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar  
di Muka Rp0*

**C.9 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima Rp0*

**C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan Rp  
943,312,098*

**C.11 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 734,968,204 dan Rp. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan 2025 dan 2024*

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	15.223.000	15.508.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Suku Cadang	928.089.098	719.460.204
<b>Jumlah</b>	<b>943.312.098</b>	<b>734.968.204</b>

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### **C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 sebesar Rp0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.13 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0 Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0*

### **C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 sebesar Rp0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah*

### **C.15 Tanah**

*Rp.2.228.156.034*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.2.228.156.034 dan Rp.2.228.156.034 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 2.141 meter persegi senilai Rp 574.030.000.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>2.228.156.034</b>
Mutasi tambah:	0
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	0
<b>Pengembangan melalui KDP</b>	<b>0</b>
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>2.228.156.034</b>

#### *Rincian Tanah TA 2025*

No	Luas	Lokasi	Nilai 31 Desember 2024	Nilai Koreksi	Nilai 30 Juni 2025
1	561 m2	Kab. Kepulauan Sangihe	257.034.000	-	257.034.000
2	731 m2	Kab. Kepulauan Talaud	95.176.000	-	95.176.000
3	849 m2	Kab. Kepulauan Talaud	221.820.000	-	221.820.000
4	1500m2	Kab. Kepulauan Sangihe	1.654.126.034	-	1.654.126.034
Jumlah			2.228.156.034	-	2.228.156.034

*Peralatan dan  
Mesin*

*Rp. 39,880,716,937*

#### **C.16 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 39,880,716,937, dan Rp.39,866,263,237,. Nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025</b>	<b>39.731.393.237</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	23.200.000
Transfer Masuk	36.879.000
Penghentian aset dari penggunaan	0
Reklas Keluar	0
Reklas Masuk	89.244.700
Transfer Keluar	0
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>39.880.716.937</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-39.447.454.868
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>79.328.171.805</b>

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp 10,071,443,993*

### **C.17 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah Rp. 10,071,443,993 dan Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025</b>	<b>10.071.443.993</b>
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Koreksi semua hasil penilaian kembali	-
koreksi nilai tim penertiban aset	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>10.071.443.993</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.343.636.680)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>8.727.807.313</b>

Tidak ada penambahan KDP

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp  
995,251,376*

### **C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.995.251.376 dan Rp.995.251.376. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025</b>	<b>995.251.376</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>995.251.376</b>
Akumulasi Penyusutan	(284.411.830)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>1.279.663.206</b>

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp0*

### **C.19 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0 dan Rp385.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp.0*

### **C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Sampai dengan Desember 2025 sudah tidak terdapat KDP, karena pekerjaan sudah selesai dan sudah membentuk aset.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap Rp.  
(41,075,503,378)*

### **C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. (41,075,503,378) dan Rp 38,514,679,056 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

*TA 2025*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	39.879.223.437	39.447.454.868	431.768.569
2	Gedung dan Bangunan	10.071.443.993	1.343.636.680	8.727.807.313
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	995.251.376	284.411.830	710.839.546
4	Tanah	2.228.156.034	0	2.228.156.034
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>53.174.074.840</b>	<b>41.075.503.378</b>	<b>12.098.571.462</b>

*Aset Tak  
Berwujud Rp0*

### **C.22 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain  
Rp.0*

### **C.23 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp. 385,000 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas atau tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Progres untuk sudah sampai

pada status henti guna namun belum diusulkan untuk lelang.

<b>Saldo Awal</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	0
<b>31 Desember 2025</b>	<b>0</b>

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0*

#### **C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp( 385,000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0*

#### **C.25 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp 2,231,827*

### **C.26 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 1 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 2,231,827 dan Rp.3,535,082. Utang kepada pihak ketiga yang ada pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Belanja Tagihan Telepon Bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp49,327
- Pembayaran Belanja Tagihan Air Bulan Desember tahun 2025 sebesar Rp2,182,500

*Utang kepada  
Pihak Kega  
Rp0*

### **C.27 Pendapatan yang di tangguhkan**

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Pendapatan  
Diterima di Muka  
Rp0*

### **C.28 Pendapatan Diterima di Muka**

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0*

### **C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Ekuitas  
Rp 13,024,428,733*

### **C.30 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 13,024,428,733 dan Rp.15,377,868,706 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP*

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Rp 0*

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0. Dan Rp 0.

*Beban*

### **D.2 Beban Pegawai**

*Pegawai Rp.  
3,930,238,134*

Jumlah Beban Pegawai periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3,930,238,134. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Untuk jumlah pegawai di Stasiun PSDKP Tahuna sebanyak 47 Pegawai.

*Rincian Beban Pegawai  
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	1.271.395.300	1.379.405.000	- 7,83
Beban Pembulatan Gaji	21.516	23.122	- 6,95
Beban Tunjangan Suami/ Istri PNS	96.035.570	107.968.980	- 11,05
Beban Tunjangan Anak PNS	30.160.726	35.660.028	- 15,42
Beban Tunjangan Struktural	13.860.000	22.680.000	- 38,89
Beban Tunjangan Fungsional	10.411.817	15.360.000	- 32,21
Beban Tunjangan PPh PNS	2.924.804	6.532.155	- 55,22
Beban Uang Beras PNS	78.068.760	90.235.320	- 13,48
Beban Uang Makan	128.039.543	103.643.000	23,54
Beban Tunjangan Umum PNS	53.460.000	54.115.000	- 1,21
Beban Uang Lembur	-	48.910.000	#VALUE!
Beban Tunjangan Kinerja	1.656.857.976	1.787.260.457	- 7,30
Beban Gaji Pokok PPPK	223.046.400	148.627.600	50,07
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.895	3.038	28,21
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.828.260	10.860.440	36,53
Beban Tunjangan Anak PPPK	4.720.000	2.254.840	109,33
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14.280.000	12.840.000	11,21
Beban Tunjangan Beras PPPK	15.063.360	9.269.760	62,50
Beban Tunjangan Umum PPPK	4.185.000		
Beban Uang Makan PPPK	25.652.000	9.373.000	173,68
Beban Uang Lembur PPPK	-	5.835.000	#VALUE!
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	287.223.207	183.383.670	56,62
<b>Jumlah Beban Pegawai (LO)</b>	<b>3.930.238.134</b>	<b>4.034.240.410</b>	<b>- 2,58</b>
Pengembalian Pembulatan Gaji	-	-	-
Pengembalian Tunjangan Umum	-	-	-
<b>Jumlah Beban Pegawai (NERACA)</b>	<b>3.930.238.134</b>	<b>4.034.240.410</b>	<b>- 2,58</b>

Beban  
Persediaan Rp  
58,977,100

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 58,977,100 dan Rp.170,326,630. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	58.977.100	170.326.630	-65,37%
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>58.977.100</b>	<b>170.326.630</b>	<b>-65,37%</b>

*Beban Barang dan Jasa Rp 6,421,682,414*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,421,682,414 dan Rp.7,114,637,316 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	424.216.731	825.375.204	-48,60%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	95.379.760	134.090.600	-28,87%
Beban Pengiriman Surat dinas PosPusat	175.200	1.671.400	-89,52%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87.240.000	87.504.000	-0,30%
Beban Bahan	4.186.869.366	4.815.741.220	-13,06%
Beban Honor Output Kegiatan	86.656.000	140.100.000	-38,15%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	361.486.417	327.455.515	10,39%
Beban barang Operasional Lainnya	261.694.014	220.910.000	18,46%
Beban Langganan Listrik	61.653.000	149.159.500	-58,67%
Beban Langganan Telepon	149.197.116	151.653.542	-1,62%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	4.000.000	-100,00%
Beban Jasa Profesi	0	900.000	-100,00%
Beban Langganan Air	43.674.500	58.700.900	-25,60%
Beban jasa Lainnya	663.440.310	170.375.435	289,40%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00%
Beban Jasa Penanganan pandemi Covid19	0	0	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>6.421.682.414</b>	<b>7.087.637.316</b>	<b>-9,40%</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp  
1,661,466,682*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,661,466,682 dan Rp. 2,390,202,945. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan semakin banyak belanja barang maupun Kontrak Pekerjaan baik itu Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Suku Cadang dan Jalan dan Jembatan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Pemeliharaan Periode 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.633.101	157.641.200	8,88%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.391.240.775	2.001.206.026	-30,48%
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00%
Beban Persediaan Suku Cadang	98.592.806	235.806.819	-58,19%
<b>Jumlah</b>	<b>1.661.466.682</b>	<b>2.394.654.045</b>	<b>-30,62%</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas Rp.  
369,408,287*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 369,408,287 dan Rp. 2,081,347,497. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan

tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	332.108.736	1.573.863.227	-78,90%
Beban Perjalanan Tetap	0	0	0,00%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.240.000	171.210.000	-86,43%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	55.635.800	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.059.551	269.411.953	-94,78%
Beban Perjalanan Dinas Biasa - luar Negeri	0	11.226.517	-100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>369.408.287</b>	<b>2.081.347.497</b>	<b>-82,25%</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024.

*Beban  
Bantuan  
Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024.

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp 2,570,848,297*

## **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,570,848,297 dan Rp. 4,713,321,250. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.310.152.640	4.460.865.566	-48,21%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	224.760.830	216.520.857	3,81%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.856.000	19.856.000	0,00%
Beban Penyusutan Irigasi	15.753.827	15.753.827	0,00%
Beban Penyusutan Jaringan	325.000	325.000	0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2.570.848.297</b>	<b>4.713.321.250</b>	<b>-45,46%</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

## **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp2,429,567.* **D.12 Kegiatan Non Operasional**  
Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,429,567 dan Rp.10,393,008. Pendapatan dari kegiatan Non Operasional berupa Selisih beban Persediaan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp. 2,429,567, tanggal 9 Januari 2025 NTPN; 9B6BD0NA0DE65VCD, NTB; 972052809479 Rp.2,429,567 sesuai risalah lelang nomor 4/16.01/2025-01 tanggal 9 Januari 2025.

*Pos Luar Biasa Rp0* **D.13 Pos Luar Biasa**  
Tidak terdapat saldo pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024.

## **E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp. 15,377,868,706* **E.1 Ekuitas Awal**  
Nilai ekuitas pada tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar RP. 15,377,868.706 dan RP. 19,039,118,302

*Defisit LO Rp (15,010,191,347)* **E.2 Surplus (Defisit) LO**  
Jumlah Defisit LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(15,010,191,347) dan Rp(20,481,673,689). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan

operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang  
Menambah/M  
mengurangi  
Ekuitas Rp0*

### **E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS**

Nilai Koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(4,609,001). Koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas merupakan hasil koreksi nilai asset dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada pengelola barang per 31 Desember 2025.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0*

#### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-.

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp5,635,472*

#### **E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas pencatatan klasifikasi BMN pada periode sebelumnya. Koreksi atas reklasifikasi periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp5,635,472 dan Rp0,-

*Koreksi Nilai  
Aset Non  
Revaluasi  
Rp(5,635,472)*

### **E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas asset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan asset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai asset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(5,635,472) dan (Rp4,671,112)

*Koreksi Lain-  
lain Rp0*

### **E.3.4 Koreksi Lain-lain**

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan (Rp8,111). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi  
Antar Entitas  
Rp  
12,656,751,374*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12,656,751,374,- dan Rp16,825,033,094,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(2.429.567)
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.659.396.766
Transfer Masuk	17.152.375
Transfer Keluar	(17.368.200)
Pengesahan Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.656.751.374</b>

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Penjelasan untuk transfer masuk per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- Lap Top 1 (satu) Unit dari Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp. 12.999.000 (dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan merk *HP Pavillion* dengan nomor BAST B.920/PSDKPSta.7/PL.450/V/2025 membentuk NUP 32
- Lap Top 1 (satu) Unit dari Pangkalan PSDKP Bitung senilai Rp. 14.350.000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan merk *Acer* dengan nomor BAST B.2529/PSDKPLan.5/PL.450/VI/2025 membentuk NUP 33
- Tablet PC 1 (satu) Unit dari Stasiun PSDKP Ambon senilai Rp. 9.530.000 (Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan merk *Samsung Galaxy Tab* dengan nomor BAST B.920/PSDKPSta.7/PL.450/V/2025 membentuk NUP 3

Sedangkan untuk transfer keluar per tgl 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

- Transfer keluar Lap Top ke Pangkalan PSDKP Bitung 1 (satu) unit senilai Rp16.875.000 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan merk *Acer* dan nomor BAST B.730/PSDKPSta.6/PL.930/VI/2025

- Transfer keluar Lap Top ke Stasiun PSDKP Pontianak 1 (satu) unit senilai Rp18.847.800 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan merk *Dell* dan nomor BAST B.731/PSDKPSta.6/PL.930/VI/2025
- Transfer keluar Lap Top ke Stasiun PSDKP belawan 1 (satu) unit senilai Rp11.396.000,00 (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan merk HP 14S dan nomor BAST B.1183/PSDKPSta.6/PL.930/VIII/2025

#### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13,024,428,733 dan Rp 15,377,868,706

#### **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

##### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2025 pada Stasiun PSDKP Tahuna

## F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

### 1. Penjelasan Capaian Output

Selama Periode Tahun Anggaran 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Satker Stasiun PSDKP Tahun. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki beberapa output strategis berupa

	Kode RO	Uraian Rincian Output	PN/ Tematik (PN xx/ T xx)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volumen Keluaran	Progres Capaian Output
1	QHD	Operasi Kapal Pengawas	PN 02	Rp 6,751,170,000	Rp 5,825,606,364	86.29%	51 Hari Operasi	51 Hari Operasi	100%
2	QHD	Operasi Speedboat Pengawas	PN 02	Rp 163,176,000	Rp 163,176,000	100%	10 Hari Operasi	20 Hari Operasi	100%
3	RCG	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	PN 02	Rp 703,151,000	Rp 703,151,000	100%	3 Unit	3 Unit	100%
4	QIC	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	PN 02	Rp 34,304,000	Rp 34,304,000	100%	1 Lembaga	5 Lembaga	100%
5	QIC	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	PN 02	Rp 62,000,000	Rp 61,985,447	99,98%	5 Lembaga	15 Lembaga	100%
Jumlah				Rp. 7,713,801,000	Rp 6,788,132,811	98,93%			

Ada koreksi target setelah relaksasi anggaran untuk Operasi KP HIU 15 target sebelumnya 31 HO menjadi 51

HO, Operasi Speedboat Napoleon 039 target sebelumnya 20 HO menjadi 10 hari operasi, untuk Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya target sebelumnya 5 menjadi 1 dan Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya target sebelumnya 15 menjadi 5

: